

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Historis

Dasar konsep tinjauan historis terdiri atas dua kata yaitu *tinjauan* dan *historis*. Dalam kamus bahasa Indonesia *tinjauan* berarti menjenguk, melihat, memeriksa, dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 1997:554).

Historis berasal dari bahasa Yunani *istoria* yang berarti ilmu yang biasanya diperuntukkan bagi penelaahan mengenai gejala-gejala terutama hal-hal manusia secara kronologis. (Rustam E. Tamburaka, 1999:2).

Dalam bahasa Indonesia kata *Historis* lebih dikenal dengan Sejarah yang berasal dari bahasa Arab yakni *syajarah* yang berarti pohon. Kata ini masuk ke Indonesia sesudah terjadi akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. (Rustam E. Tamburaka, 1999:2).

Definisi atau batasan mengenai sejarah, Sejarah merupakan gambaran tentang perubahan-perubahan peristiwa pada masa lampau (Hugiono dan P.K Poerwantana, 1992:9-10).

Sartono Kartodirdjo membagi sejarah dalam dua pengertian, yaitu :

1. Sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruk, ialah bangunan yang disusun penulis sebagai uraian atau cerita. uraian atau cerita itu merupakan suatu kesatuan atau inti yang mencakup fakta-fakta terangkakan untuk menggambarkan suatu gejala sejarah, baik proses maupun struktur. Kesatuan itu menunjukkan koherensi, artinya pelbagai unsur bertalian satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Fungsi unsur-unsur itu saling menopang dan saling tergantung satu sama lain.

2. Sejarah dalam arti objektif menunjuk kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri, ialah proses sejarah dalam aktualitasnya. Kejadian itu sekali terjadi dan tidak dapat terulang kembali. Bagi orang yang ada kesempatan mengalami suatu kejadian sebenarnya hanya dapat mengamati dan mengikuti sebagian dari totalitas kejadian atau peristiwa itu. Keseluruhan proses itu berlangsung terlepas dari subjek manapun juga; jadi, objektif dalam arti tidak memuat unsur subjek (pengarang atau pengamat). Dalam ucapan sejarah berulang rupanya yang dimaksud adalah sejarah dalam arti objektif, sedangkan ucapan kita perlu belajar dari sejarah akan lebih menunjuk sejarah dalam arti subjektif (Sartono Kartodirdjo, dalam H. Rustam E. Tamburaka, 2009:14).

Menurut Muhammad Yamin Sejarah adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya berhubungan dengan cerita bertarih sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang telah lampau atau tanda-tanda yang lain (Muhammad Yamin). (<http://blog.bukukita.com/user/ermawati/postId>)

Sidi Gazaldi mencoba menggambarkan Sejarah sebagai masa lalu manusia dan seputarnya yang disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kephahaman tentang apa yang berlaku (Sidi Gazaldi) (Dimuat dalam <http://blog.bukukita.com/user/ermawati/postId>)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka sejarah adalah ilmu yang mempelajari segala peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang dialami manusia dan disusun secara sistematis sehingga hasilnya dijadikan sebagai pedoman hidup untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan demikian konsep tinjauan historis adalah suatu prosedur penelitian terhadap segala peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang terjadi pada manusia kemudian disusun secara sistematis, logis, faktual, sehingga memiliki makna yang jelas terhadap fenomena peristiwa tersebut.

H. Rustam E. Tamburaka ada beberapa tujuan dan manfaat dengan mempelajari sejarah, yaitu :

1. untuk memperoleh pengalaman mengenai peristiwa-peristiwa sejarah di masa lalu baik positif maupun pengalaman negatif dijadikan hikmah agar kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali.
2. untuk mengetahui dan dapat menguasai hukum-hukum sejarah yang berlaku agar kemudian dapat memanfaatkan dan menerapkan bagi mengatasi persoalan-persoalan hidup saat sekarang dan yang akan datang.
3. untuk menumbuhkan kedewasaan berpikir, memiliki vision atau cara pandang ke depan yang lebih luas serta bertindak lebih arif dan bijaksana terutama dalam mengambil keputusan
(H. Rustam E. Tamburaka, 2009: 9-10).

Menurut pendapat Robert Jones Shafer (1974) manfaat sejarah adalah sebagai berikut:

1. Memperluas pengalaman-pengalaman manusiawi. Belajar sejarah sama artinya berdialog dengan masyarakat dan bangsa manapun dan di saat kapan pun. Dari pengalaman sejarah itu orang dapat menimba pengalaman-pengalaman dalam menghadapi dan memecahkan problem-problem kehidupan dalam segala aspeknya seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pada dasarnya problem-problem kehidupan manusia hampir sama, yang berbeda adalah detail dan intensitasnya. Cara mengatasi dan memberikan tanggapan terhadap masalah, baik secara intelektual maupun secara emosional, juga tidak terlalu berbeda. Dengan belajar sejarah, karenanya, sikap dan kepribadian seseorang akan menjadi lebih matang.
2. Dengan belajar sejarah akan memungkinkan seseorang untuk dapat memandang sesuatu secara keseluruhan (*to see things whole*). Sejarah menawarkan begitu banyak dan bervariasi (*the multiplicity or variety*) kondisi dan pengalaman manusia. Tidak ada disiplin ilmu yang mampu menyajikan rekaman pengalaman manusia yang begitu menyeluruh, selain sejarah. Agama, filsafat, dan ilmu-ilmu sosial lainnya memberikan sumbangan yang sama, namun hanya sebatas dan menurut cara ilmu itu sendiri. Dimensi keseluruhan dalam sejarah diharapkan akan mampu membangun keutuhan kepribadian manusia.
3. Sejarah memiliki peranan penting dalam pembentukan identitas dan kepribadian bangsa. Suatu masyarakat atau bangsa tak mungkin akan mengenal siapa diri mereka dan bagaimana mereka menjadi seperti sekarang ini tanpa mengenal sejarah. Sejarah dengan identitas bangsa memiliki hubungan timbal-balik. Akar sejarah yang dalam dan panjang akan memperkokoh eksistensi dan identitas serta kepribadian suatu bangsa. Bangsa itu, karenanya, akan bangga dan mencintai sejarah dan kebudayaannya (Robert Jones Shafer, dalam Caspiati. *Manfaat Sejarah secara edukatif, inspiratif, instruktif dan rekreatif*. (dimuat dalam <http://id.answers.yahoo.com/question/index>)

Dengan demikian Sejarah adalah akumulasi rekaman pengalaman manusia. Mempelajari sejarah berarti mempelajari segala bentuk puncak pengalaman dan perubahan yang telah dicapai manusia sepanjang abad. Dari sejarah masa lampau manusia memperoleh bekal dan titik pijak untuk membangun sejarah baru. Kehidupan manusia selalu harus berdialog dengan sejarah masa lalu untuk dapat membangun sejarah di masa sekarang, serta memproyeksikan

pandangan ke dalam sejarahnya di masa mendatang. Dimensi kesejarahan menuntut manusia untuk selalu melakukan pembaharuan dan berupaya mencapai kemajuan.

2. Konsep Transmigrasi

Pada permulaan abad ke 20, Pemerintah Belanda mulai menyadari bahwa kemiskinan sedang meningkat di Pulau Jawa. Salah satu alasannya adalah kepadatan penduduk yang semakin tinggi. Di dalam usaha untuk memperbaiki kondisi rakyat di Pulau Jawa, Pemerintah Belanda memperkenalkan kebijaksanaan baru yang disebut *ethische politiek* yang diajukan oleh Van Deventer, yaitu dengan mengusahakan edukasi, irigasi, dan emigrasi yang diharapkan dapat memperbaiki keadaan sosial ekonomi di pedesaan Jawa. Kebijakan emigrasi mulai dilaksanakan pada tahun 1905 melalui suatu program yang dinamakan kolonisasi, yang ditandai dengan pengiriman 155 Kepala Keluarga yang dipindahkan ke Gedong Tataan. Sebagai kelanjutan program kolonisasi yang dijalankan oleh pemerintah Belanda, Pemerintah Indonesia menjalankan program transmigrasi yang dimulai sekitar tahun 1950, dalam Pemerintah Kabinet Natsir tepatnya tanggal 12 Desember dengan diberangkatkannya 23 keluarga (77 jiwa) ke Lampung (Ramadhan dkk, 1993:11).

Menurut Rozy Munir dalam Sri Ediswasono (1986:275) transmigrasi adalah pemindahan atau perpindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam wilayah RI guna kepentingan pembangunan Nasional berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Ada beberapa jenis transmigrasi yaitu :

a. Transmigrasi spontan

Setelah hubungan dari Jawa ke Lampung dipulihkan kembali, mengalirlah penduduk dari Jawa ke Lampung dan Sumatera Selatan menuju kedaerah-daerah transmigrasi. Arus ini makin lama makin besar sehingga terjadilah transmigrasi spontan.

b. Transmigrasi Corp Cadangan Nasional (CCN)

Transmigrasi ini lebih mirip dengan dislokasi pasukan-pasukan militer yang kemudian di daerah luar Jawa didemolisasi.

c. Transmigrasi Biro Rekonstruksi Nasional (BRN)

Setelah perjuangan persenjataan selesai, laskar-laskar bersenjata yang tergabung dalam Komando Distrik Militer dibubarkan. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak desa yang bisa kembali ke desa masing-masing. Tetapi karena ekonominya sangat lemah mereka tidak dapat menjamin kehidupan keluarganya yang ikut berjuang, keadaan dirasakan semakin gawat. Keadaan itulah yang mendorong Pemerintah RI untuk membuat transmigrasi bekas anggota badan-badan perjuangan bersenjata (Slamet Purboadiwidjojo, 1986:21).

Dari beberapa jenis transmigrasi di atas, transmigran keluarga TNI Angkatan Laut di Prokimal Kotabumi Lampung Utara dapat digolongkan ke dalam jenis transmigrasi Biro Rekonstruksi Nasional (BRN). Tugas BRN sendiri adalah untuk memulihkan bekas-bekas anggota badan perjuangan bersenjata untuk dapat kembali ke masyarakat dengan memberikan pendidikan kerja, menyalurkan kebidang industri, dan tentu saja sebagian besar ke bidang transmigrasi Pertanian.

3. Transmigrasi dalam lintas Sejarah Sesudah Kemerdekaan

Masa awal Kemerdekaan Indonesia, mengurangi jumlah penduduk pulau Jawa merupakan alasan utama program pemindahan penduduk yang kemudian disebut transmigrasi. Setelah 6 bulan Proklamasi Kemerdekaan, Wakil Presiden RI Bung Hatta menyatakan bahwa: Indonesia, pandangan-pandangan negatif harus disingkirkan dengan konsepsi penyelenggaraan yang tepat dan fakta yang benar. Transmigrasi adalah masalah dalam negeri

Indonesia, dan bagian dari hak membangun bangsa dan negara Indonesia (Rukman Sardjadidjaja, 2004:21).

Masa Pemerintahan Orde Lama (Pra PELITA)

Masa pra Pelita program transmigrasi merupakan salah satu program utama dibidang kependudukan, karena jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1961 sudah mencapai 96 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,5 % pertahun. Menurut pemerintah Orde Lama, apabila pembangunan ekonomi dilaksanakan secara besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia akan mampu menampung 250 juta penduduk. Dalam Surat Peraturan Kementrian Sosial, tanggal 2 Februari 1951, No. Kab.10.6.20, dan tanggal 17 Februari 1953, No. BU 1-7-2-501, tertera tujuan transmigrasi yang diselenggarakan pemerintah adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan cara mengadakan pemindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, dengan tujuan untuk membangun perekonomian dalam segala bidang (Sjamsu, 1960)

Tahun 1952 program transmigrasi telah dicetuskan oleh Ir. AHO. Tamboenan berupa rencana 35 Tamboenan, untuk memindahkan penduduk P.Jawa selama jangka waktu 35 tahun dengan target 31 juta KK sampai dengan tahun 1987. Setelah program-program pembangunan nasional disusun secara nasional oleh Dewan Perencanaan Nasional (Depernas) tahun 1959, dibidang ketransmigrasian dikenal pula Rencana Lima Tahun Jawatan Transmigrasi, yaitu program transmigrasi yang menargetkan pemindahan 2 juta penduduk selama 5 tahun. Setelah Depernas berganti nama dengan nama Bappenas pada zaman orde lama (1964), target pemindahan penduduk menjadi 15 juta transmigrasi untuk jangka waktu 8 tahun (Rukman Sardjadidjaja, 2004:26).

Pada Masa Pemerintahan Orde Baru (PELITA)

Pada awal masa Orde Baru, khususnya selama Repelita I, dari Rencana Pembangunan Nasional yang disiapkan oleh Bappenas, perhatian untuk sektor transmigrasi relatif sangat kecil. Dari target sebesar 40.950 KK yang harus dipindahkan, selama pelita I hanya dapat dipindahkan sebesar 25.530 KK atau equivalen dengan 127.689 jiwa. Dalam repelita II, mulai ditetapkan target jumlah penduduk yang akan dipindahkan melalui program transmigrasi, yaitu sebesar 250.000 KK atau equivalen dengan 1,25 juta jiwa. Disebutkan pula bahwa Sasaran kebijaksanaan transmigrasi adalah meningkatkan jumlah transmigran sebanyak mungkin. Selama Pelita II, ternyata jumlah transmigran yang berhasil dipindahkan hanya sekitar 41.000 KK atau equivalen dengan 204.250 jiwa.

Pemerintah pada waktu itu mengharapkan bahwa dimasa selanjutnya perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dapat terjadi dengan sendirinya tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Jadi penyelenggaraan transmigrasi harus lebih mengutamakan swadaya masyarakat. Program Transmigrasi pada Pelita III ditargetkan sebesar 500.000 KK dan pada Pelita IV ditargetkan sebesar 750.000 KK, realisasi dari target kedua Pelita tersebut mencapai 100%. Selain itu dari seluruh transmigran yang dikirim, persentase transmigran swakarsa terus meningkat jumlahnya (Rukman Sardjadidjaja, 2004:29).

B. Kerangka Pikir

Persebaran penduduk yang tidak merata dan tidak seimbang adalah faktor penyebab terhambatnya pembangunan nasional di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan program transmigrasi yang merupakan kelanjutan dari Kolonisasi Pemerintah Belanda. Transmigrasi dan kolonisasi banyak memiliki

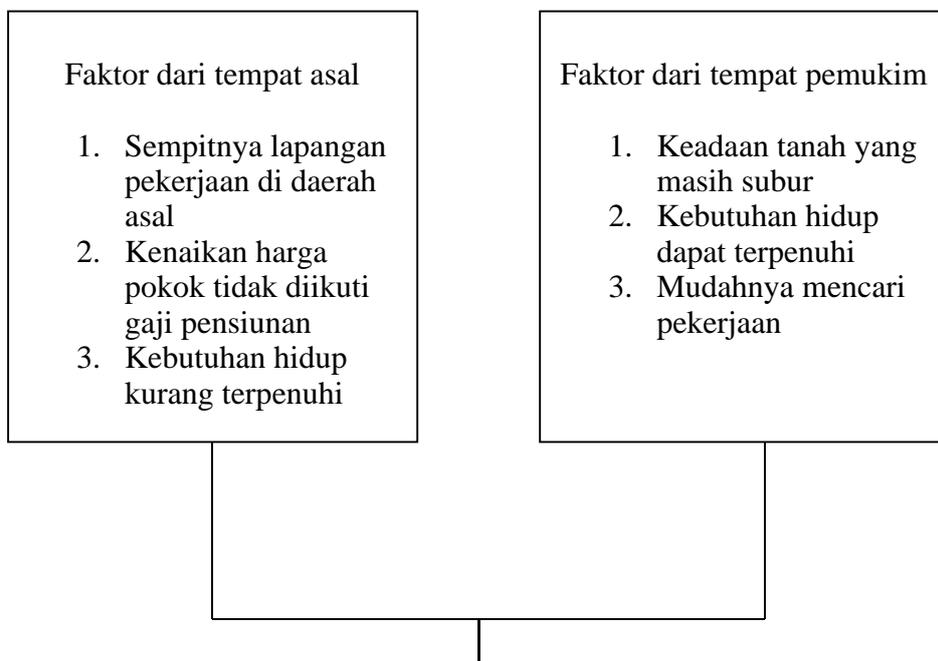
tujuan yang sama yaitu untuk memindahkan penduduk yang padat di suatu daerah atau wilayah ke daerah yang tidak padat penduduknya.

Bentuk dari transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah transmigrasi TNI Angkatan Laut yang berada di Prokimal Kotabumi Utara Lampung Utara. Umumnya sifat para transmigran adalah mereka pindah dengan seluruh anggota keluarganya dan ini juga terjadi pada transmigran TNI Angkatan Laut di Prokimal Kotabumi Utara Lampung Utara berangsur-angsur jumlah transmigran TNI Angkatan Laut yang datang semakin banyak, dari tahun 1971 sampai sekarang jumlah transmigran TNI AL mencapai 5452 kepala keluarga.

Terjadinya program transmigrasi di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dari daerah asal dan faktor dari tempat pemukiman. Beberapa faktor dari daerah asal masyarakat untuk bertransmigrasi dari daerah asal diantaranya adalah sempitnya lapangan pekerjaan dan rendahnya gaji pensiunan sehingga kebutuhan hidup kurang terpenuhi, sedangkan faktor dari tempat pemukiman bagi masyarakat untuk bertransmigrasi ke daerah pemukiman adalah kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya banyaknya lapangan pekerjaan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka perlu dilakukannya transmigrasi pensiunan ALRI ke prokimal, sehingga mereka bisa memperoleh kehidupan yang lebih layak

C. Paradigma



Keterangan :

→ = Garis akibat